



Article Informations
Corresponding Email:
miftahshaury@gmail.com

Received: 19/06/2025; Accepted:
20/08/2025; Published: 15/10/2025

KERJASAMA INDONESIA DENGAN TIONGKOK DALAM MENGATASI TERORISME DI INDONESIA TAHUN 2014-2017

Muhammad Miftah Shaury¹⁾, Yusep Ginanjar²⁾, I Wayan Aditya

Harikesa³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dan RRT ditandai dengan penandatanganan kesepakatan pada November 2007. RRT merupakan mitra strategis yang diselenggarakan dalam konteks kepentingan nasional Indonesia untuk membangun kemampuan pertahanan dan penanganan isu-isu keamanan bersama kedua negara. Metode penelitian yang digunakan, yaitu dengan metode kualitatif deskriptif. Dengan metode ini, peneliti menggambarkan mengenai permasalahan yang dikaji, serta menggunakan teori yang ada untuk menganalisisnya. Selain itu, peneliti mengumpulkan segala informasi yang berkaitan dengan kasus dengan mendalam. Kedua negara ini mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendorong penyelesaian konflik secara damai dengan bekerja sama. Indonesia dan Tiongkok, yang masing-masing menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2007-2008, setuju untuk menghindari penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian konflik internasional. Dari tahun 2014 hingga 2017, Indonesia dan Tiongkok bekerja sama dalam berbagai hal, seperti diplomasi multilateral, ekonomi, dan keamanan regional.

Kata Kunci : Indonesia, Tiongkok, Kerjasama, PBB

Abstract

Defense cooperation between Indonesia and the PRC was marked by the signing of a memorandum of understanding in November 2007. The PRC is a strategic partner organized in the context of Indonesia's national interests to build defense capabilities and handle common security issues of both countries.

The research method used is the descriptive qualitative method. With this method, researchers describe the problems studied, and use existing theories to analyze them. In addition, researchers collect all information related to the case in depth. Both countries support the UN Security Council resolution that encourages peaceful conflict resolution by working together. Indonesia and China, which each served as non-permanent members of the UN Security Council in 2007-2008, agreed to avoid the use of military force in resolving international conflicts. From 2014 to 2017, Indonesia and China cooperated in various matters, such as multilateral diplomacy, economics, and regional security.

Key words : Indonesia, China, Cooperation, PBB

1. PENDAHULUAN

Kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan RRT ditandai dengan penandatanganan kesepahaman pada November 2007. RRT merupakan mitra strategis yang diselenggarakan dalam konteks kepentingan nasional Indonesia untuk membangun kemampuan pertahanan dan penanganan isu-isu keamanan bersama kedua negara. Lingkup pertukaran informasi mengenai kelembagaan dan masalah-masalah pertahanan, pertukaran para pejabat dalam rangka pendidikan dan pelatihan profesional, saling kunjung dan riset bersama, pertukaran data ilmiah dan teknologi, para ahli, teknis, pelatih, dan bentuk kerja sama teknis lainnya, peningkatan kerja sama antara institusi dalam bidang teknologi pertahanan dan industri kedua negara, kerja sama di bidang latihan pertahanan, serta kerja sama di bidang lain yang menjadi kepentingan bersama.

Hubungan diplomatik Indonesia dengan Tiongkok telah terjalin sejak 1952. Setelah sempat menjadi “sekutu” Indonesia dalam Poros Jakarta Peking Pyongyang pada era 1960-an, hubungan diplomatik kedua negara terputus pada periode 1967- 1990. Hubungan diplomatik ini telah terjalin selama lebih dari 60 tahun. Hubungan ini terjalin tidak lepas dari kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif dalam memandang konstelasi Indonesia dengan Tiongkok yang terjadi pada tahun 1950. Dimana saat itu, Indonesia telah mengakui berdirinya Tiongkok yang baru, yaitu sebagai negara yang mengandung sistem komunis dan Indonesia tercatat sebagai negara yang mengakui pemerintahan Tiongkok bersifat komunis.

Indonesia dan Tiongkok bekerja sama dalam meningkatkan industri pertahanan untuk memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia dan memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia di kawasan Asia. Pada masa kepemimpinan SBY, China menjadi salah satu negara terbesar yang mendukung penguatan kemampuan pertahanan Indonesia. Indonesia dan Tiongkok memulai kerja sama sebagai mitra strategis pada tanggal 25 April 2005 dengan menandatangani perjanjian kerja sama strategis yang berfokus pada kerja sama di bidang politik dan keamanan, kerja sama dan pembangunan, serta kerja sama budaya dan sosial. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara, Indonesia mempunyai peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Terorisme dapat mengganggu keamanan nasional dan menghambat pembangunan ekonomi, yang merupakan prioritas utama pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah memimpin proses pengembangan ACCT (Articles of Association for Cooperation in Counter- Terrorism) untuk memperkuat kerja sama ASEAN dalam kontra-terorisme.

Nama Abu Sayyaf yang dalam bahasa Arab berarti "bapak pedang" diambil dari nama seorang mujahidin asal Afganistan yang berperang melawan rezim Soviet pada tahun 1980-an. Ironisnya, kelompok Abu Sayyaf justru mulai dikenal seluruh dunia pada pertengahan tahun 1990an ketika mereka gagal melaksanakan dua misi besar: menyerang 12 pesawat komersial milik Amerika Serikat dan membunuh Paus Yohanes Paulus II dan Abu Sayyaf diperkirakan memiliki 2.000 pendukung dan antara 200 hingga 500 anggota inti dari kalangan akademisi. Menurut data yang dirilis oleh Global Terrorism Database, Filipina merupakan negara yang paling banyak mengalami serangan teroris di Asia Tenggara antara tahun 1970an dan 2013. Jumlah serangan teroris Terorisme di Filipina adalah yang tertinggi dibandingkan tahun lalu. negara- negara lain. negara-negara ASEAN. Negara Anggota Jumlah kejadian teroris di Filipina lebih tinggi sekitar 988 dibandingkan di Laos yang hanya mengalami satu kejadian.

Dan disitu juga terlihat negara dengan jumlah kasus terbanyak kedua adalah Indonesia dengan 83 kasus, Myanmar dengan 36 kasus, Malaysia

dengan 15 kasus dan terakhir dengan 2 kasus. Kelompok Abu Sayyaf merupakan gerakan yang lahir di Basilan. Lahirnya kelompok ini ditandai dengan dimulainya perpecahan di dalam gerakan MNLF, dimana Abdurajak Janjalani tidak setuju dengan cara diplomasi yang dilakukan Nur Misuari sebagai pemimpin MNLF saat itu. Untuk mencapai tujuan berdirinya negara Islam di Filipina selatan. Kelompok Abu Sayyaf melakukan perlawanan sengit. Kelompok Abu Sayyaf telah banyak melakukan pengeboman, penculikan dan eksekusi sandera.

Gerakan kelompok Abu Sayyaf jelas terlihat sebagai gerakan yang berujung pada konflik antar agama, begitu juga dengan unsur politik yang awalnya diperjuangkan Abdurajak Janjalani. Kelompok Abu Sayyaf berjuang untuk membebaskan umat Islam Moro dari penjajahan umat Kristen karena jika melihat sejarahnya, Filipina pernah menjadi negara Kesultanan Sulu yang pernah menang di negara ini. Faktor inilah yang menjadi landasan perjuangan bangsa Moro untuk merdeka dari negara Filipina. Perkembangan lainnya disebabkan oleh banyaknya umat Kristen yang tinggal di pulau selatan Mindanao dan mengakibatkan perpindahan umat Islam dari pulau tersebut ke wilayah pesisir. pulau ini. Merasa terpinggirkan, kelompok Abu Sayyaf berusaha membebaskan wilayah tersebut dengan memusuhi umat Kristen dengan meneror mereka dengan kekerasan.

Keberadaan kelompok Abu Sayyaf didukung bantuan dari luar Filipina. Al-Qaeda, jaringan teroris internasional, telah memberikan dukungan finansial kepada kelompok Abu Sayyaf. Al-Qaeda membantu Abu Sayyaf memperluas jaringannya. Semua kebutuhan senjata Abu Sayyaf didanai oleh Al-Qaeda. Selain itu, seluruh kelompok Abu Sayyaf juga menerima uang tebusan sandera. Hingga saat ini keberadaan kelompok Abu Sayyaf masih bertahan di Filipina dengan cita-cita ingin mendirikan negara Islam. Pemerintah Filipina telah mengusulkan banyak solusi, namun kelompok ini tidak dapat menerima tindakan damai dan lebih memilih perang. Pemerintah Filipina dan Amerika Serikat telah berusaha menghentikan gerakan tersebut, namun kelompok tersebut masih sulit diberantas karena menggunakan metode gerilya dalam gerakannya.

Sejak memisahkan diri dari MNLF (Moro Nation Liberation Front), Abu Sayyaf telah menculik dan menyandera warga Filipina dan kulit putih. Tidak jarang sandera dibunuh, terutama mereka yang tidak memenuhi tuntutan uang tebusan. Misalnya saja pada November 2015, turis Malaysia Bernard Ghen Ted Fen dibunuh setelah keluarganya gagal menyelesaikan uang tebusan sebesar 40 juta peso Filipina atau setara Rp 12 miliar. Sebagian besar aksi Abu Sayyaf terjadi di Mindanao bagian selatan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengatakan peningkatan perompakan di perairan kawasan dapat mengubah kawasan tersebut menjadi “Somalia baru”. Pасalnya, pemerintah khawatir pembajakan di jalur pelayaran sibuk sepanjang perbatasan laut Indonesia-Filipina bisa mencapai tingkat yang sebanding dengan yang terjadi di Somalia jika keamanan tidak diperketat. Perairan ini merupakan bagian dari jalur penting yang mengangkut barang senilai \$40 miliar setiap tahunnya.

Koridor ini digunakan oleh supertanker yang kelebihan muatan dari Samudera Hindia sehingga tidak dapat melintasi Selat Malaka yang padat. Sebanyak 18 warga negara Indonesia dan Malaysia ditangkap dalam tiga serangan terpisah terhadap tongkang di perairan Filipina sepanjang jalur tersebut, oleh kelompok Abu Sayyaf yang terkait dengan Al-Qaeda di Filipina. Abu Sayyaf, sebuah kelompok yang terkenal dengan penculikan, pemenggalan kepala, pemboman dan pemerasan, telah menuntut uang tebusan sebesar 50 juta peso (\$1,1 juta) untuk pembebasan awak kapal asal Indonesia tersebut. Indonesia dan Tiongkok telah menjalin kemitraan strategis di bidang kerja sama pertahanan dan keamanan sejak tahun 2007. Kerja sama ini didasarkan pada perjanjian yang ditandatangani di Beijing pada tanggal 7 November 2007. Kemitraan ini bertransformasi menjadi kemitraan komprehensif dengan tujuan memperkuat kerja sama kedua negara, serta semakin tumbuhnya rasa saling percaya antar kedua negara dalam berbagai aspek, khususnya di bidang pertahanan.

Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok mempunyai banyak bentuk kerja sama, seperti menyelenggarakan forum pertemuan bilateral tahunan mengenai industri pertahanan Indonesia dan Tiongkok

telah menjalin kerja sama dalam bentuk pertemuan Pertemuan bilateral tahunan mengenai industri pertahanan, seperti Konferensi Kerja Sama Industri Pertahanan (DICM), yang ketua delegasinya adalah pejabat setingkat Direktur Jenderal (Dirjen). Latihan angkatan laut gabungan Indonesia dan Tiongkok telah melakukan latihan angkatan laut gabungan, serta program untuk perwira militer dan lembaga think tank.

Metode penelitian yang digunakan, yaitu dengan metode kualitatif deskriptif. Dengan metode ini, peneliti menggambarkan mengenai permasalahan yang dikaji, serta menggunakan teori yang ada untuk menganalisisnya. Selain itu, peneliti mengumpulkan segala informasi yang berkaitan dengan kasus dengan mendalam. Dalam metode kualitatif, instrumen utama penelitiannya adalah peneliti itu sendiri, yang mana peneliti menganalisis masalah yang diteliti sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna. Dalam hal ini peneliti sebagai human instrument “menentukan arah penelitian, memilih penyedia informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, dan mengevaluasi kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan mengambil keputusan mengenai hasilnya. Hal-hal tersebut dilakukan oleh peneliti sebagai human instrument dalam penelitian ini untuk menganalisis permasalahan yang diteliti.

2. PEMBAHASAN

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama pertahanan dan keamanan dari melihat mereka melaksanakan kerjasama antar Indonesia dan Tiongkok melalui MOU, peneliti ini melihat dari MOU tersebut dengan positif. Yang di sebabkan untuk memperkuat kerjasama dalam pemberantasan terorisme dengan itu mereka memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan.

Salah satu persoalan terkait terorisme yang patut mendapat perhatian khusus dan harus diselesaikan bersama adalah keberadaan kelompok Abu Sayyaf yang basisnya terletak di kepulauan selatan Filipina yang membedakan Kelompok Abu Sayyaf dengan kelompok separatis di Filipina

adalah tindakan yang dilakukan Kelompok Abu Sayyaf cenderung lebih ekstrim. Tidak mengherankan jika kelompok Abu Sayyaf dianggap sebagai kelompok teroris aktif paling berbahaya di Asia Tenggara.

Kerjasama Internasional Antara Indonesia dan Tiongkok

Dari tahun 2014 hingga 2017, Indonesia dan Tiongkok bekerja sama dalam berbagai hal, seperti diplomasi multilateral, ekonomi, dan keamanan regional. Kedua negara ini aktif bekerja sama dalam forum internasional seperti PBB, ASEAN, dan organisasi internasional lainnya. Selain itu, mereka memiliki pendapat yang sama tentang berbagai masalah global, seperti keamanan regional, perdamaian dunia.

Kedua negara ini mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendorong penyelesaian konflik secara damai dengan bekerja sama. Indonesia dan Tiongkok, yang masing-masing menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2007-2008, setuju untuk menghindari penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian konflik internasional. Kedua negara mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB pada tahun 2016 untuk menangani krisis Suriah dan menekankan pentingnya solusi politik. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB sejak 1971, Tiongkok memiliki hak veto dan pengaruh besar dalam pengambilan keputusan mengenai masalah global.

Sebagai anggota tetap, Tiongkok juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat di Dewan Keamanan mematuhi prinsip-prinsip PBB, termasuk menghindari penggunaan kekuatan militer. Dalam hal ini, Indonesia dan Tiongkok mencapai konsensus bahwa mereka akan mendukung penyelesaian konflik melalui dialog dan diplomasi. Indonesia dan Tiongkok menyatakan dukungan mereka terhadap Resolusi 2254, serta langkah-langkah diplomatik yang disarankannya. Mereka berdua setuju bahwa penyelesaian konflik Suriah harus dicapai melalui proses politik yang inklusif, bukan intervensi militer atau kekuatan bersenjata. Dalam hal ini, kedua negara menekankan betapa

pentingnya berbicara dengan semua orang di Suriah pemerintah dan kelompok oposisi.

Indonesia sangat mendukung prinsip-prinsip PBB yang mengutamakan kedaulatan negara dan menghindari kekuatan militer. Selain itu, Indonesia meminta agar PBB tetap bertanggung jawab atas proses perdamaian di Suriah dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang terkena dampak. Dengan statusnya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Tiongkok dapat membantu resolusi tersebut. Selain menentang penggunaan kekuatan militer oleh negara-negara luar, Tiongkok mendukung penyelesaian konflik Suriah melalui cara politik dan diplomatik. Tiongkok menekankan bahwa sangat penting untuk menghindari intervensi asing yang dapat memperburuk situasi di Suriah.

Negara Sebagai Aktor Utama

Indonesia dan Tiongkok secara aktif bekerja sama untuk memerangi terorisme. Negara-negara ini telah setuju untuk meningkatkan kapasitas, memperkuat pertukaran informasi intelijen, dan bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam pencegahan dan penanganan terorisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Indonesia, Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel, dan Menteri Keamanan Publik Tiongkok, Wang Xiaohong, menandatangani MOU terbaru pada 1 November 2023. MoU ini menegaskan kembali hubungan yang erat antar kedua negara dan menunjukkan pentingnya kemitraan strategis Indonesia-Tiongkok dalam mendorong perdamaian, stabilitas, serta keamanan di kawasan dan sekitarnya dalam terciptanya kesejahteraan bersama masyarakat internasional. Dalam MoU ini, Indonesia dan Tiongkok berkomitmen untuk melakukan berbagai hal, termasuk kerja sama di bidang informasi, pengalaman, dan praktik terbaik, serta meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dan keamanan dalam penanggulangan terorisme.

MoU ini juga bertujuan untuk meningkatkan upaya deradikalisasi. Sebelumnya, pada tahun 2014, Indonesia dan Tiongkok telah menandatangani MoU serupa. MoU tersebut mencakup kerja sama dalam

pertukaran informasi intelijen, pelatihan bersama, dan meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum kedua negara. Indonesia dan Tiongkok telah bekerjasama dengan baik dan akan terus memperkuat kerja sama ini karena keadaan keamanan global berubah. Kerjasama ini menunjukkan komitmen mereka untuk secara efektif dan berkelanjutan menghadapi ancaman terorisme, serta meningkatkan stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut.

Balance Of Power

Indonesia menggunakan kerjasama pertahanan dengan Tiongkok sebagai alat strategis untuk meningkatkan kekuatan militernya, memperkuat diplomasi pertahanan, dan menjaga kepentingan nasional di dunia yang dinamis dan seringkali anarkis. Banyak hal yang berkaitan dengan kerja sama ini, seperti pertukaran teknologi, latihan militer bersama, dan diskusi strategis. Indonesia dan Tiongkok bekerja sama dalam pengadaan dan alih teknologi alutsista. Untuk ilustrasi, rudal C-705 dibeli dari Tiongkok melalui komitmen untuk alih teknologi dan produksi bersama di Indonesia. Langkah ini meningkatkan kemandirian industri pertahanan Indonesia dan mengurangi ketergantungannya pada negara-negara Barat. Selain itu, kerja sama pertahanan mencakup latihan militer dan pendidikan militer. Tiongkok memberikan hibah fasilitas pendidikan, termasuk laboratorium bahasa Mandarin, untuk mendukung pemahaman teknis personel militer Indonesia.

Indonesia dan Tiongkok menandatangani pernyataan bersama pada tahun 2015 untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif mereka, termasuk dalam bidang pertahanan. Diputuskan bahwa kedua negara akan meningkatkan pembicaraan tentang pertahanan, latihan bersama, kunjungan kapal militer, dan kerja sama dalam bidang pertahanan dan teknologi. Selain itu, mereka berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama dalam memerangi tantangan keamanan konvensional dan non-konvensional, seperti kejahatan terorisme dan kejahatan lintas negara. Dalam situasi ini, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat dan Pasukan Khusus Angkatan Bersenjata Tiongkok (PLA) telah melakukan latihan bersama. Latihan ini dikenal sebagai "kapak tajam". Tujuan dari latihan ini

adalah untuk meningkatkan hubungan militer kedua negara dan meningkatkan kemampuan untuk memerangi terorisme.

Pada tahun 2014–2017, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok mengikuti pola hedging strategi diplomatik di mana negara berusaha menjalin hubungan baik dengan satu kekuatan besar (Tiongkok) sambil tetap menjalin kemitraan strategis dan pertahanan dengan kekuatan besar lainnya (seperti AS dan Australia). Tujuannya adalah untuk menghindari dominasi satu pihak yang dapat mengancam kedaulatan negara dan stabilitas regional dengan menyeimbangkan pengaruh kekuatan regional yang signifikan. Indonesia mengambil pendekatan dengan meningkatkan hubungan ekonomi dan investasi dengan Tiongkok, terutama melalui proyek infrastruktur yang termasuk dalam Belt and Road Initiative (BRI). Sebaliknya, Indonesia terus menjalin hubungan pertahanan dan latihan militer dengan AS, Jepang, dan Australia. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia mengimbangi hubungan strategisnya daripada berkonsentrasi pada satu kutub kekuatan.

Self Help

Dalam pertemuan bilateral dengan Tiongkok, Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa, meskipun menjalin kerja sama pertahanan dengan Tiongkok, Indonesia tetap berpegang pada prinsip non-blok dan tidak berpihak. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mempertahankan independensi strategis dan tidak bergantung pada blok kekuatan mana pun. Fokus kerjasama pertahanan Indonesia-Tiongkok adalah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional melalui latihan militer bersama, penguatan alat utama sistem senjata, dan kerjasama dalam industri pertahanan. Bukan untuk menciptakan ketergantungan, tujuan kerjasama ini adalah memperkuat wilayah dan kedaulatan negara.

Pemerintah Indonesia telah berulang kali menegaskan bahwa kerjasama pertahanan dengan Tiongkok dilakukan dengan pendekatan yang saling menghormati dan menguntungkan sambil tetap menekankan diskusi dan konsultasi untuk menjaga stabilitas di wilayah tersebut. Indonesia

memanfaatkan kerjasama ini untuk meningkatkan kemampuan militer dan teknologinya sendiri. Karena lokasinya di kawasan strategis Indo-Pasifik, Indonesia sering mengalami perubahan geopolitik yang signifikan. Ini disebabkan oleh banyak faktor, termasuk ketegangan di Laut Cina Selatan, konflik kekuatan AS- Tiongkok, dan masalah keamanan non-tradisional seperti terorisme dan pelanggaran wilayah maritim. Indonesia percaya bahwa ketergantungan pada negara lain untuk melindungi negaranya dapat menjadi masalah strategis.

Jadi, dalam politik pertahanan, pemerintah Indonesia menerapkan prinsip self- help, yang berarti membangun kemampuan pertahanan negara secara mandiri melalui modernisasi alutsista dan pengembangan industri pertahanan sendiri. Selain membeli senjata dari Tiongkok, Indonesia mendorong alih teknologi. Salah satu contoh yang signifikan adalah pengadaan rudal C-705, yang direncanakan dibuat oleh PT Dirgantara Indonesia dan mitra dari Tiongkok. Ini membantu Indonesia menjadi lebih bergantung pada pembelian dan lebih mampu membuat produk sendiri.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kerjasama Indonesia Tiongkok pada tahun 2014-2017 ini mendapatkan Kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan RRT ditandai dengan penandatanganan kesepakatan pada November 2007. RRT merupakan strategis yang diselenggarakan dalam konteks kepentingan nasional Indonesia untuk membangun kemampuan pertahanan dan penanganan isu-isu keamanan bersama kedua negara. Kerja sama telah setuju untuk meningkatkan kapasitas, memperkuat pertukaran informasi intelijen, dan bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam pencegahan dan penanganan terorisme.

Dari tahun 2014 hingga 2017, Indonesia dan Tiongkok bekerja sama dalam berbagai hal, seperti diplomasi multilateral, ekonomi, dan keamanan regional. Kedua negara ini aktif bekerja sama dalam forum internasional seperti PBB, ASEAN, dan organisasi internasional lainnya. Indonesia dan

Tiongkok secara aktif bekerja sama untuk memerangi terorisme. MoU ini bertujuan untuk melakukan berbagai hal, termasuk kerja sama di bidang informasi, pengalaman, dan praktik terbaik, serta meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dan keamanan dalam penanggulangan terorisme.

Indonesia menggunakan kerjasama pertahanan dengan Tiongkok sebagai alat strategis untuk meningkatkan kekuatan militernya, memperkuat diplomasi pertahanan, dan menjaga kepentingan nasional di dunia yang dinamis dan seringkali anarkis. Banyak hal yang berkaitan dengan kerja sama ini, seperti pertukaran teknologi, latihan militer bersama, dan diskusi strategis. Fokus kerjasama pertahanan Indonesia-Tiongkok adalah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan melalui latihan militer bersama, penguatan alat utama sistem senjata, dan kerjasama dalam industri pertahanan. Indonesia memanfaatkan kerjasama ini untuk meningkatkan kemampuan militer dan teknologinya sendiri. Jadi, dalam politik pertahanan, pemerintah Indonesia menerapkan prinsip self-help, yang berarti membangun kemampuan pertahanan negara secara mandiri melalui modernisasi alutsista dan pengembangan industri pertahanan sendiri. Salah satu contoh yang signifikan adalah pengadaan rudal C-705, yang direncanakan dibuat oleh PT Dirgantara Indonesia dan mitra dari Tiongkok.

DAFTAR PUSTAKA

Arum Fitria, "Kerjasama Indonesia-China : Transfer Tekhnologi di Bidang Industri Pertahanan (Study Kasus Pembuatan Rudal C-705)," Skripsi, UNDIP, diakses 2024.

Buku Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, "Keamanan Nasional Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan Bagi Bangsa Indonesia," Hal. 9. Diakses pada 3 Mei 2024

"Charles Kossay, "Tantangan Keamanan ASEAN dalam Menangani Ancaman Terorisme di Laut Sulawesi dan Laut Sulu," skripsi., Universitas Kristen Indonesia, 2018, hal 56. Di akses pada November 2024

Dessy Armelin, Terorisme di Asia Tenggara dan Terbentuknya Konvensi Tentang Pemberantasan Terorisme," skripsi., Universitas Sumatera Utara, 2011, hal. 12

Giuliani Agustha Namora, "PERAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM DALAM PENANGANAN TERORISME DI FILIPINA. Diakses pada 27 Mei 2024.

Kenneth Waltz, Theory of International Politics, (Berkeley : Addison-Wesley Publishing Company, 1979) Hal 126. Diakses pada 3 Mei 2024

Mahrus Ali, Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hal. 42. Diakses Pada Juni 2024

Made Adi Lesmana, et al., "ASEAN Way Sebagai Sebuah Paradoks: Kasus Terorisme

Kelompok Abu Sayyaf," Jurnal Udayana. Vol. 31 No. 6 (2016) hal. 10

Nahdia Rachmayati, "Dinamika Hubungan Indonesia-China Pada Era Pemerintahan SBY", Skripsi, Universitas Brawijaya, diakses 2024.

ASEAN Secretariat. (2021). "ASEAN-China Cooperation on Counter-Terrorism and Transnational Crime." ASEAN Regional Forum Journal, 25(2), 34-50.

A.C Manulang DR, Terorisme dan Perang Intelejen (Jakarta :Hanna Zaitun, 2006) hal. 17. Diakses pada 25 April 2024

BBC, Lima hal tentang kelompok Abu Sayyaf Filipina, www.bbc.com. Indonesia dunia 2016/04/160411 dunia lima hal abu sayyaf. Diakses pada 31 Mei 2024

Bimo Wiwoho, "Masuk DK PBB, Pemerintah Diminta MUI Aktif Tangkal Terorisme", CNN (10 Juni 2018) internet, 26 Maret 2025. www.cnnindonesia.com

CNN Indonesia abu sayyaf teroris di selatan Filipina. Diakses pada Juni 2024

Ewit Soctriadi, 2010, "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorismo dengan Hukum Pidana", thesis, Magister Ilmu Hukum. Hal 4. Diakses pada 7 Mei 2024